BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009 NOMOR : 23

P E R A T U R A N W A L I K O T A B A N D U N G

NOMOR 780 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 240 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 240 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2009;

b. bahwa dalam perkembangannya terdapat Pegawai Negeri Sipll di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang belum terakomodir yang sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Bandung Nomor 240 Tahun 2009 Bandung

c. bahwa berdasarkan pertimbangan g sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sebagaimana menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 240 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2009,

Mengingat…..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang, Cuti Pegawai Negeri Sipil.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

16.Keputusan…..

Mengingat : 16. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian daerah:

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganID Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung:

21. Peraturan Daerah Kota Bandung NOmor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang., Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bandung dengan Dewan Bandung Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor $\frac{920/2500-Keu}{910/821}$ tanggal 12 November 2008 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'rahun Anggaran 2009;

2. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor $\frac{920/2500-Keu}{910/821}$ tanggal 12 November 2008 tentang Prioritas dan Plalon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2009-.

MEMUTUSKAN…

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 240 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 240 Tahun 2009 tentang Belanja Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2009 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ditambah, sehingga Pasal selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNSD diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD clan SPD.

(2) Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada PNSD yang dibebani pekerjaan untuk menvelesaikan tugas-tugas yang meliputi :

a. PNSD yang memegang Jabatan Struktural;
b. Pelaksana yang diberi tups/ abatan tertentu;
c. PNSD dan CPNSD selaku pelaksana pada SKPD;
d. Tenaga Fungsional (Tenaga Kesehatan, Analis Administrasi Kepegawaian, Widyaiswara Him Sosial dan yang berkaitan, kualltas clan keamanan, Arsiparis, Pustakawan clan yang berkaitan, Peneliti, Perencana, Ilmu Hayat, Guru, Pamong Belajar, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik).

(3) Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi,meliputi :

a. Petugas Lapangan Pemadam Kebakaran;
b. Petugas Lapangan Polisi Pamong, Praja;
c. Petugas Lapangan Dinas Perhubungan;
d. Petugas Khusus Wesel Board, Sentral Operator, Pengolah Surat clan Ekspeditur Surat.

(4) Standar Biaya Pemberian Tambahan Penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) tercantum dalam Lampiran I

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga Lampiran I selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR :
TANGGAL:

BESARAN DAN RINCIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009

A. **JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS YANG MEMEGANG JABATAN STRUKTURAL**

No	Kelompok/Jenis Jabatan	Standar Biaya 2009
(1)	(2)	(3)
1	Eselon II.a	7,000,000
2	a. Eselon II.b	3,250,000
	b. Eselon II.b (Asisten)	5,000,000
	b. Eselon II.b (Staf Ahli)	3,250,000
	c. Eselon II.b (Inspektorat)	5,000,000
3	a. Eselon III.a	1.950.000
	b. Eselon III.a	3,000,000
	c. Eselon III.a	2,250,000
4	a. Eselon III.b	1,625,000
	b. Eselon III.b	1,875,000
5	a. Eselon IV.a	1,300,000
	b. Eselon IV.a	2,000,000
	c. Eselon IV.a	1,500 000

B. JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS YANG MEMEGANG JABATAN / TUGAS TERTENTU

No	**Kelompok/Jenis Jabatan**	**Standar Biaya 2009**
(1)	(2)	(3)
I	PELAKSANA YANG DIBERITUGAS/JABATAN TERTENTU	
1	Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota/Wakil	900,000
2	Ajudan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah	555,750
3	Pelaksana pada Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah	737,750
4	Pengelola Urusan Asisten Sekretariat Daerah	737,750
5	Pengelola Urusan pada Bagian Sekretariat Daerah	555,750
6	Pembantu Teknis Alat Kelengkapan DPRD	
	a. Golongan III	585,000
	b. Golongan II	487,500
7	Pengacara Daerah	2,275.000,

NO	Kelompola/Jenis Jabatan	Standar Biaya 2009
(1)	(2)	(3)
II	**A. PNS PELAKSANA PADA SKPD :**	
	a. Pelaksana Golongan IV	357,500
	b. Pelaksana Golongan III	325,000
	c. Pelaksana Golongan II	292,500
	d. Pelaksana Golongan I	276,250
	B. PNS PELAKSANA PADA Kewilayahan :	
	a. Pelaksana Golongan IV	412,500
	b. Pelaksana Golongan III	375,000
	c. Pelaksana Golongan II	337,500
	d. Pelaksana Golongan I	318,750
	C. CPNS (80% Sesuai Golongan)	
	a. Pelaksana Golongan IV	
	b. Pelaksana Golongan III	260,000
	c. Pelaksana Golongan II	2')4.000
	d. Pelaksana Golongan 1	221,000
	D. CPNS (80% Kewilayahan)	
	a. Pelaksana Golongan IV	
	b. Pelaksana Golongan III	300,000
	c. Pelaksana Golongan 11	270.000
	d. Pelaksana Golongan I	255,000
III	**A. PNS PELAKSANA PADA SKPD :**	
	a. Pelaksana Golongan IV	357,500
	b. Pelaksana Golongan III	325,000
	c. Pelaksana Golongan II	292,500
	d. Pelaksana Golongan I	276.250
	B. PNS PELAKSANA PADA Kewilayahan :	
	a. Pelaksana Golongan IV	412,500
	b. Pelaksana Golongan III	375,000
	c. Pelaksana Golongan II	337,500
	d. Pelaksana Golongan I	318,750
	C. CPNS (80% Sesuai Golongan)	
	a. Pelaksana Golongan IV	
	b. Pelaksana Golongan III	260,000
	c. Pelaksana Golongan II	234,000
	d. Pelaksana Golongan I	221,000
	D. CPNS (80% Kewilayahan) :	
	a. Pelaksana Golongan IV	
	b. Pelaksana Golongan III	300,000
	c. Pelaksana Golongan II	270,000
	d. Pelaksana Golongan I	255.000

No	Kelompok/Jenis.Jabatan	Standar Biaya 2009
(1)	(2)	(3)
IV	TENAGA FUNGSIONAL :	
1	Tenaga Kesehatan	
	a. Medis (Dokter & Apoteker)	
	- Golongan IV	666.250
	- Golongan III	666,250
	b. Kesehatan Keperawatan(Bidan & Perawat)	
	- Golongan III	442,000
	- Golongan II	442,000
	c. Kesehatan Non Keperawatan(Nutrisionist, Pranata Laboratorium. anitarian, Radiografer, Asisten Apoteker, Teknik Elektro Medik, dministrasi Kesehatan)	
	- Golongan 111	354,250
	- Golongan 11	354,250
2	Analis Administrasi Kepegawaian	
	- Golongan III	354,250
3	Pendidikan Lainnya	
	a. Widya Iswara :	
	- Widya Iswara Utama	975,000
	- Widya Iswara Madya	910,000
	- Widya Iswara Muda	845.000
	- Widya Iswara Pertama	780.000
	b. Instruktur Latihan Kerja	390,000
4	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	
	a. Penyuluh perindustrian dan perdagangan	357,500
	b. Pengantar Kerja	357,500
	c. Mediator	357,500
	d. Pekerja Sosial	357,500
	e. Penyuluh Keluarga Berencana	357,500
5	Kualitas dan Keamanan	
	a. Pengawas ketenagakerjaan	357,500
	b. Penguji kendaraan bermotor	357,500
6	Arsiparis,Pustakawan dan yang berkaitan	
	a. Pustakawan	357,500
	b. Arsiparis	357,500

No	KelompolaJenis Jabatan	Standar Biaya 2009
(1)	(2)	(3)
II	**A. PNS PELAKSANA PADA SKPD :**	
	a. Pelaksana Golongan IV	357,500
	b. Pelaksana Golongan III	325,000
	c. Pelaksana Golongan 11	292,500
	d. Pelaksana Golongan I	276,250
	B. **PNS PELAKSANA PADA Kewilayahan :**	
	a. Pelaksana Golongan IV	412,500
	b. Pelaksana Golongan 111	375,000
	c. Pelaksana Golongan II	337,500
	d. Pelaksana Golongan I	318,750
	C. **CPNS (80% Sesuai Golongan)**	
	a. Pelaksana Golongan IV	
	b. Pelaksana Golongan III	260,000
	c. Pelaksana Golongan II	234.000
	d. Pelaksana Golongan I	221,000
	D. **CPNS (80% Kewilayahan)**	
	a. Pelaksana Golongan IV	
	b. Pelaksana Golongan III	300,000
	c. Pelaksana Golongan 11	270.000
	d. Pelaksana Golongan I	255,000
III	A. **PNS PELAKSANA PADA SKPD :**	
	a. Pelaksana Golongan IV	357,500
	b. Pelaksana Golongan 111	325,000
	c. Pelaksana Golongan II	292,500
	d. Pelaksana Golongan I	276.250
	B. **PNS PELAKSANA PADA Kewilayahan :**	
	a. Pelaksana Golongan IV	412,500
	b. Pelaksana Golongan III	375,000
	c. Pelaksana Golongan 11	337,500
	d. Pelaksana Golongan I	318,750
	C. **CPNS (80% Sesuai Golongan)**	
	a. Pelaksana Golongan IV	
	b. Pelaksana Golongan III	260,000
	c. Pelaksana Golongan II	234,000
	d. Pelaksana Golongan I	221,000
	D. **CPNS (80% Kewilayahan) :**	
	a. Pelaksana Golongan IV	
	b. Pelaksana Golongan III	300,000
	c. Pelaksana Golongan 11	270,000
	d. Pelaksana Golongan I	255.000

No	Kelompok/Jenis Jabatan	Standar Biaya 2009
(1)	(2)	(3)
7	Matematika, Statistika dan yang berkaitan	
	I) a. Peneliti Pertama	550,000
	b. Peneliti Muda	550,000
	c. Peneliti Madya	550,000
	d. Peneliti Utama	550.000
	II) Perencana Bappeda	550,000
8	Akuntan dan Anggaran	
	- Auditor	
	a. Auditor Ahli Utama	2,500,000
	b. Auditor Ahli Madya	2,250,000
	c. Auditor Ahli Muda	2,000,000
	d. Auditor Ahli Pertama	1,750,000
	e. AuditorTerampil Penyelia	1,200,000
	f. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	1.100,000
	g. Auditor Terampil Pelaksana	1,000,000
9	Ilmu Hayat :	
	- Pengendali organisms pengganggu tumbuhan	
10	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	
	a. Guru	200,000
	b. Pamong Belajar	200.000
	c. Kepala Sekolah	200,000
	d. Pengawas Sekolah	200,000
	e. Penilik	200,000

C. JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA YANG MEMILIKI RESIKO TINGGI

No	Kelompok/Jenis Jabatan	Standar Biaya 2009
(1)	(2)	(3)
1	PETUGAS LAPANGAN PADA DINAS KEBAKARAN	
	a. Pelaksana PNS	700,000
	b. Pelaksana CPNS 80%	560,000
2	PETUGAS LAPANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN	
	a. Pelaksana PNS	700,000
	b. Pelaksana CPNS 80%	560,000
3	PETUGAS LAPANGAN PADA SATPOL PP	
	a. Pelaksana PNS	700,000
	b. Pelaksana CPNS 80%	560,000
4	PETUGAS KHUSUS WESEL BOARD, SENTRAL OPERATOR, PENGOLAH SURAT DAN EKSPEDITUR SURAT	525,000

Pasal I I

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG.

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 23